

BAB III

PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI TERKAIT PERLUASAN KERJA SAMA INDONESIA DI BIDANG MARITIM

Doktrin politik luar negeri Indonesia bebas aktif merupakan hasil pemikiran dari Mohammad Hatta yang dicetuskan pertama kali pada tanggal 2 September 1948 dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta. Politik Bebas Aktif memiliki dua unsur di dalamnya, yaitu Bebas yang berarti tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam suatu aliansi militer. Dalam arti yang lebih luas, Bebas memiliki arti sebagai menunjukkan nasionalisme yang tinggi, menolak keterlibatan maupun ketergantungan dengan pihak luar yang dinilai akan mengurangi kedaulatan. Sedangkan Aktif memiliki arti bahwa Indonesia selalu menentang penjajahan dan memajukan perdamaian dunia.

Konsep 'bebas-aktif' yang digagas oleh Mohammad Hatta sebagai pondasi kebijakan luar negeri Indonesia memiliki latar belakang dimana Mohammad Hatta tidak ingin Indonesia terseret dalam kontestasi Perang Dingin yang baru berkecamuk pada tahun 1947. Presiden-presiden terdahulu Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai konsep bebas-aktif tersebut. Di bawah Demokrasi Terpimpin, kebijakan luar negeri bebas-aktif Soekarno terlihat semakin menjauh dan semakin ke "kiri". Pendapat ini diperkuat dengan Soekarno yang sering membela kelompok komunis. Sebaliknya pada era Soeharto, beliau merubah kecenderungan kebijakan luar negeri menjadi semakin ke "kanan." Ide dan gagasan yang berorientasi pada pembangunan menjadi jargon utama Soeharto ketika memimpin Indonesia. Pada era BJ Habibie yang memerintah di era transisi, beliau lebih fokus dengan permasalahan dalam negeri dengan 'membersihkan' sisa-sisa kekacauan di era Soeharto. Kebijakan luar negeri Indonesia yang digagas oleh

Gus Dur lebih berfokus pada peningkatan citra Indonesia di mata internasional. Sementara itu, Megawati lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan. Hal tersebut mengakibatkan ASEAN kembali menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia yang kurang mendapat perhatian pada era Presiden sebelumnya yaitu Gus Dur. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan luar negeri Indonesia di atas jalur yang semakin stabil. Konsep “many friends-zero enemy” menjadi jargon utama kebijakan luar negeri yang digagas Susilo Bambang Yudhoyono (Maksum, 2015)

Dewasa ini pun politik luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada politik luar negeri Bebas Aktif yang memiliki dasar UUD 1945. Arah politik Bebas Aktif Indonesia berorientasi pada kepentingan nasional, menitik-beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat (Yani, 2017)

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah melalui berbagai perubahan prinsip dalam kancah internasional maupun domestik. Hal ini menyebabkan politik luar negeri Indonesia perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini demi kepentingannya di masa depan mendatang. Politik internasional mengalami perubahan besar dimana hal tersebut bermula sejak awal tahun 1990-an yang ditandai dengan berakhirnya perang dingin. Perubahan ini pun telah memicu perubahan tidak hanya struktur dan tatanan hubungan antarnegara yang terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia II, namun juga merubah berbagai agenda dan isu politik global. Dunia saat ini tidak lagi didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan hegemoni ideologi komunisme dan liberalismenya, tetapi cenderung mengarah ke multipolar dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang membentuk tatanan internasional yang baru.

Perubahan-perubahan tersebut juga diiringi dengan semakin derasnya arus globalisasi yang ditandai oleh saling ketergantungan dan keterikatan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui peningkatan perdagangan, investasi dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Perubahan yang signifikan ini telah mendorong terjadinya transformasi yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan setiap negara dan bangsa serta hubungan internasional yang semakin kompleks. Sosok dunia yang cenderung semakin terintegrasi secara global pada kenyataannya menimbulkan suatu dilema mengenai makna kedaulatan itu sendiri. Sementara itu gerakan menuju integrasi regional di bidang politik dan ekonomi serta peran *Multi National Corporation* (MNC) yang semakin besar dalam hubungan internasional telah melahirkan identitas baru yang tidak lagi menempatkan negara sebagai aktor tunggal.

Politik luar negeri selalu erat kaitannya pada dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal sebuah negara. C.C.Rodee mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan strategi atau taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain. Sedangkan pemahaman politik luar negeri yang disampaikan oleh Coulumbis dan Wolfe merupakan campuran dari kepentingan nasional yang disertai dengan power dan juga kapabilitas dimana tujuannya adalah demi meraih kepentingan nasional. Definisi lain juga disampaikan oleh S.L.Roy juga mengatakan bahwa politik luar negeri sebagai perwujudan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain (Delanova, 2017).

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan instrumen politik luar negeri yang efektif dan efisien agar mampu memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kancah internasional. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau disebut dengan RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang menyebutkan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun mendatang adalah terwujudnya peranan Indonesia yang

meningkat dalam pergaulan dunia internasional. Terkait dengan sasaran pokok tersebut, dalam RPJPN dirumuskan pula bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam panggung internasional.

A. KEBIJAKAN LUAR NEGERI *INWARD LOOKING* JOKOWI

Jika selama ini Presiden Indonesia setelah era Soekarno lebih memprioritaskan kebijakan ke luar (*outward looking*) serta membuat Indonesia aktif di panggung internasional, maka Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan aspek maritim dan lebih berfokus dengan kebijakan ke dalam (*inward looking*) demi membangun pondasi negara yang kuat. Sayangnya sebagai bangsa maritim yang secara geografis terletak di tengah-tengah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, pada periode pemerintahan Indonesia sebelumnya perhatian terhadap aspek maritim cenderung terabaikan. Ini terlihat dari era orde lama dan orde baru yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi non-maritim. Pemerintahan era Joko Widodo ini dianggap sebagai *turning point* dengan membangkitkan kembali identitas Indonesia sebagai bangsa maritim melalui kebijakan *inward looking*-nya. Selain itu, isu eksternal non-tradisional seperti masalah perbatasan, masalah lingkungan, pekerja migran serta penyelundupan manusia yang seringkali menjadi isu maritim yang sebelumnya tidak menjadi perhatian Presiden-presiden terdahulu mulai terlihat. Faktor eksternal inilah yang mendorong Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan permasalahan yang ada dalam rangka melindungi warga negaranya sekaligus membangun hubungan yang baik dengan negara-negara kawasan serta memperkuat Indonesia sebagai bangsa maritim (Wirasenjaya, 2018)

Situmorang menyebutkan terdapat setidaknya empat argumen yang menyatakan kecenderungan *inward looking* atau

orientasi ke dalam dari kebijakan luar negeri yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Situmorang, 2015). Pertama, dengan prinsip politik luar negeri yang dianut hingga saat ini, yakni prinsip bebas-aktif, prinsip ini membebaskan segala interpretasi dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi, yang menyebutkan “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi ini mempertegas makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Di dalamnya juga tercantum sikap dan sifat “aktif” untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif yakni gotong-royong.

Dengan berdasarkan pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan amanat konstitusi, maka misi atau tujuan kebijakan luar negeri Jokowi adalah sebagai berikut; (1) Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional; (2) Meningkatkan peran Indonesia secara global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia; (3) Memperluas jangkauan keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dan; (4) Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Selain itu terdapat pula empat prioritas yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi, yakni (1) Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri; (2) Perlindungan sumber daya alam dan perdagangan; (3) Produktivitas perekonomian; dan (4) Pertahanan keamanan nasional, regional serta perdamaian dunia. Jokowi juga mengedepankan diplomasi total di dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan negara-negara lain.

Kedua, Pada dasarnya dinamika politik internasional yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo tidak berbeda dari dinamika politik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain isu politik keamanan, agenda utama global tetaplah pada perekonomian. Sekalipun ketegangan-ketegangan politik mempengaruhi kinerja ekonomi internasional, forum-forum internasional masih tetap didominasi oleh persoalan ekonomi, baik itu dalam rangka meningkatkan kerjasama untuk memproduksi lebih banyak keuntungan dan kebaikan bersama, maupun dalam rangka mengatasi kemunduran yang mungkin terjadi, termasuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi, investasi, dan perdagangan.

Ketiga, yaitu mengenai dinamika politik dalam negeri. Daya tarik atau beban politik domestik sebenarnya tidak berhenti pada relasi Presiden (lembaga kepresidenan dan kabinet) dan DPR (beserta partai-partai politik). Sejalan dengan agenda konsolidasi demokrasi, dengan adanya sejumlah masalah pokok maka Presiden perlu membuka mata terhadap masalah pokok yang ada. Diantaranya adalah upaya peningkatan kepatuhan pada hukum (law-enforcement), pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, penguatan lembaga-lembaga demokrasi (seperti partai politik dan media) serta perluasan konstituen demokrasi.

Keempat, prinsip politik luar negeri Indonesia “bebas-aktif” dan tujuan konstitusional negara Indonesia selain membuka ruang pada interpretasi dan perumusan prioritas sebagaimana dibahas sebelumnya, juga membuka ruang terhadap berbagai model pengambilan keputusan. *Rational Actor Model* (RAM), misalnya, yang menyatakan bahwa setiap pemerintah atau pembuat keputusan politik luar negeri melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai informasi, fakta, dan peristiwa yang terjadi. Keputusan dan kebijakan negara-negara lain juga perlu dicermati dan dikaji. Hasil kajian yang tersusun melalui *cost-and-benefit analysis* akan menghasilkan pengambilan kebijakan yang lebih

menguntungkan. Salah satu kesulitan dan sekaligus persoalan atau kelemahan yang ada pada “model aktor rasional” adalah keharusan untuk mengetahui semua aspek-aspek yang terkait dengan tujuan, perhitungan, pilihan-pilihan, konsekuensi yang terkait dengan proses, hasil, dan akibat dari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dalam mewujudkan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong-royong tersebut, pemerintahan Joko Widodo akan menempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menompang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
2. kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
3. Menciptakan masyarakat yang lebih maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.
4. Menciptakan serta menjalankan politik luar negeri yang berbasis pada bebas-aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
5. Menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
6. Menciptakan bangsa yang memiliki daya-saing tinggi.
7. Menciptakan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Menciptakan masyarakat yang memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik merupakan ciri yang paling krusial dan harus dimiliki oleh negara yang berdaulat. Kedaulatan dalam bidang politik adalah kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan

kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Mandiri dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan ekonomi dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam mewujudkan upaya Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka Presiden Jokowi menetapkan sembilan agenda strategis dalam pemerintahannya yang disebut Sembilan Cita-Cita, atau kerap disebut NAWACITA yaitu sebagai berikut: Pertama, menciptakan negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif; Kedua, membuat pemerintah tidak henti-hentinya terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Keempat, menjadikan Indonesia negara yang lebih kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Kelima, meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia; Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat yang memiliki daya saing di pasar internasional; Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa, dan; Kesembilan, memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat karakter Indonesia.

Dari Sembilan Cita-Cita yang sudah dipaparkan di atas, terdapat dua agenda yang berkaitan dengan masalah luar negeri, yakni berkaitan dengan kemandirian ekonomi dengan

mengerakkan sektor-sektor ekonomi domestik di mana diberlakukannya pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia secara maksimal baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya (Amaliyah, 2015). Sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal agar negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa adanya ketergantungan dengan negara lain serta melibatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri. Tujuannya adalah untuk bermitra dengan negara Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, yang berhubungan dengan masalah luar negeri lainnya yakni menghadirkan kembali peranan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Salah satu bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi demi menjaga kedaulatan NKRI yakni menenggelamkan kapal ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal yang berpotensi akan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Presiden Jokowi di bawah pemerintahannya dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri, akan mewujudkan sebuah diplomasi yang bersifat kerakyatan. Lebih jauh, ini diartikan sebagai langkah-langkah mewujudkan sifat diplomasi yang membumi yang memiliki orientasi pada kepentingan rakyat, dan dapat memberikan manfaat. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus membumi, tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu diplomasi yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri dan segenap pemangku kepentingan, adalah diplomasi pro rakyat.

Diplomasi haruslah bersifat pemberi solusi atas perbedaan, yaitu dengan menjadi jembatan atas perbedaan dan juga membuka peluang untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Politik luar negeri harus selalu diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini kepentingan nasional yang paling utama yakni mengenai proses pemulihan ekonomi

sehingga cita-cita untuk memakmurkan rakyat dapat terwujud. Dalam hal ini pula pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menegakkan keadilan sosial. Hak dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak ini menjadi inti tujuan nasional yang harus dipenuhi pemerintah melalui pelaksanaan politik luar negeri.

Sebagai sebuah negara demokrasi, politik luar negeri Indonesia juga harus mencerminkan aspirasi publik secara luas. Oleh karena itu opini publik dalam proses perumusan kebijakan termasuk di bidang politik luar negeri menjadi semakin penting. Politik luar negeri tidak dapat lagi dianggap sebagai ranah eksklusif para elit pembuat kebijakan. Hanya saja terkadang opini publik tidak selalu rasional dan ada kalanya dapat bersifat kontradiksi bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan mengenai bagaimana memilah opini publik yang selaras dengan kepentingan bersama.

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi melaksanakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang mampu memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa prinsip politik luar negeri, yakni semua negara adalah sahabat, namun dalam pelaksanaannya apabila ada negara yang ikut campur pada kedaulatan negara, maka hal itu tidak dapat ditolerir lagi dan harus mendapatkan tindakan tegas dari Presiden Jokowi.

Prioritas teratas Jokowi adalah membangun infrastruktur dan membangun konektivitas maritim. Prioritas ini dibuat untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga naik sebesar 7 persen, sesuai dengan target ekonomi pemerintah Indonesia. Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan adanya perdamaian dan keamanan yang terjaga. Karena itu, Indonesia

harus turut melanjutkan peran aktifnya dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

B. KEBIJAKAN KELAUTAN: MENUJU POROS MARITIM DUNIA

Sebagai negara yang menyandang predikat Negara Kepulauan Maritim dengan 13.500 pulau dan wilayah laut yang memiliki panjang sekitar 3.000 mil serta posisi perdagangan strategis Indonesia yang berada di antara 2 samudera serta 2 benua, Indonesia memiliki visi sebagai Poros Maritim Dunia dimana pemerintah memiliki agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya adalah pembangunan kembali budaya maritim yang sempat terabaikan, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Seperti yang sudah diketahui bahwa kekayaan sumber daya kelautan dari laut yang mengelilingi Indonesia berpotensi sangat besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pengaturan dan pemanfaatan laut harus dilaksanakan secara teratur agar terhindar dari resiko kerusakan populasi, habitat dan ekosistem. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh menjalin dan memperkuat kerjasama bersama negara maju untuk pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Selain itu, perlu bagi Indonesia untuk memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan daerah laut.

Perekonomian dunia saat ini sedang memasuki fase era baru. Pembuatan kebijakan oleh aktor yang berkepentingan serta organisasi-organisasi perdagangan dunia yang di latarbelakangi oleh globalisasi gencar aktif di kancah internasional. Perdagangan dunia saat ini dipegang oleh Cina. Sementara itu, Amerika dan Eropa yang dulu pernah menguasai perekonomian global kini sedang berada di titik lesu. Hal ini membuat arus perdagangan berubah dan meningkatkan volume

perdagangan hingga 45 % dari total perdagangan laut dengan melintasi laut Indonesia (Hanim & Noorman, 2017)

Berbagai cara ditempuh Indonesia diantaranya melalui upaya pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui pembangunan tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia selama jangka waktu lima tahun kedepan. Singkatnya, untuk menuju Negara Poros Maritim Dunia akan mencakup praktek dan proses pembangunan maritim di berbagai aspek, seperti politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, infrastruktur, terutama aspek ekonomi dan regulasinya.

Merujuk dari segi definisi, kelautan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mencakup hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Beberapa upaya oleh pemerintah untuk melindungi wilayah laut Indonesia diantaranya melakukan perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan banyaknya kegiatan yang dapat mencemari wilayah laut Indonesia, seperti *illegal fishing*, pembuangan limbah cair ke laut serta kecelakaan kapal *tanker* pengangkut minyak di laut.

Dari gambaran mengenai betapa strategisnya Indonesia beserta lautnya, ini berdampak pada aspek perekonomian. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2.400.000 kilometer persegi serta potensi laut Indonesia yang kaya akan sumber daya seharusnya menjadi penunjang bagi Indonesia agar menjadi negara yang lebih sejahtera dan makmur. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang cukup luas serta memiliki banyak

sektor yang dapat digali potensinya, yaitu antara lain sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi laut lepas, dan sektor perikanan. Namun faktanya, beragam sektor tersebut hingga saat ini belum banyak dieksplorasi sehingga membuka peluang besar bagi kapal-kapal asing untuk mengeruk kekayaan laut Indonesia secara ilegal. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya kapal-kapal dengan bendera asing yang akhir-akhir ini kerap diberitakan oleh media sekaligus membuktikan bahwa kekayaan laut Indonesia sangat banyak dan belum bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk saat ini Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi ekonomi laut. Permasalahannya adalah kurang maksimalnya pemanfaatan disebabkan oleh Indonesia yang belum didukung oleh teknologi yang canggih.

Potensi yang dapat digali pada sumber daya laut Indonesia jumlahnya banyak. Sebagai contoh, apabila menggali potensi ikan di laut Indonesia, maka sudah seharusnya nilai ekspor terhadap ikan tinggi. Namun kurangnya daya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia sendiri menyebabkan nilai ekspor terhadap ikan menjadi sukar untuk naik. Akibatnya, pasar domestik Indonesia terhadap ikan masih tergolong rendah. Oleh karena itu penting bagi rakyat Indonesia untuk mengkonsumsi ikan guna meningkatkan nilai ekspor. Selain itu juga pemerintah memiliki kewajiban untuk kreatif mengkampanyekan program gemar ikan sebagaimana yang telah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan.

Tridoyo Kusumastanto (Hanim & Noorman, 2017) menyebutkan setidaknya ada 7 sektor kelautan yang memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi bangsa dan patut menjadi fokus pemerintah. Sektor tersebut antara lain pertambangan, perikanan, jasa kelautan, industri kelautan, pariwisata bahari, bangunan kelautan, dan perhubungan laut. Menurut perhitungan beliau, kelautan menyumbang sekitar 22,5% dari produk domestik bruto (PDB). Persentase yang cukup tinggi itu membuat sektor kelautan menjadi penting dan

mempunyai perhatian khusus. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa masalah dan tantangan yang tidak dapat dihindari. Dimulai dari identifikasi dan pemanfaatan SDL, manajemen birokrasi, revisi peraturan perundang-undangan, serta upaya meningkatkan investasi. Identifikasi harus dilakukan untuk memudahkan pemerintah dan pemangku kebijakan guna menghasilkan solusi yang solutif dan relevan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menjadikan sektor kelautan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ini, misalnya, dengan melakukan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya laut dan perikanan. Pengelolaan ini dapat berupa pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan kesimpulan, alokasi sumber dan implementasinya menyangkut segenap potensi baik sumber daya laut yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan ini harus memperhatikan keadaan sumber daya laut saat ini serta kemampuannya memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang dimana aspek keberlanjutan harus meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Kedua, melakukan penanaman modal dalam negeri guna mendorong peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan. Ini dimaksudkan supaya masyarakat Indonesia dapat menikmati besarnya potensi sumber daya laut dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, perlunya peran pemerintah untuk melakukan kajian lebih detail mengenai usaha-usaha perikanan yang dapat dikembangkan di Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Kajian ini penting dilakukan karena perlunya percepatan inovasi dan kreasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Dengan abstainnya inovasi dan kreasi, maka program yang sedang dikembangkan ini besar kemungkinannya akan terhenti.

Ketiga, memperbaiki daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar internasional. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat agar

meningkatkan nilai daya saing produk kelautan karena kemitraan antar empat elemen tersebut sangatlah penting demi menaikkan kualitas produk kelautan dan perikanan. Yang tidak kalah pentingnya, perlu diadakannya program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat berupa pelatihan, penyuluhan dan keterampilan yang lebih terpadu kepada masyarakat yang bekerja dan akan bekerja di sektor perikanan dan kelautan.

Keempat, pentingnya bagi negara untuk menyusun regulasi agar dapat mengelola perikanan dan kelautan secara optimal. Sifat dari regulasi tersebut haruslah bersifat *problem solving* terhadap permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Sebagai contoh, permasalahan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi serta sengketa perbatasan. Jika regulasi ini dijalankan dengan baik serta disampaikan kepada masyarakat, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk menjalankan perekonomian yang berbasis maritim, maka lahirilah undang-undang nomor 32 Tahun 2014 yang memiliki 13 bab. Beberapa implikasi lahirnya undang-undang ini adalah, pertama, lahirnya Badan Keamanan Laut yang disingkat dengan Bakamla sebagai implikasi dari Pasal 59. Bakamla merupakan badan yang menangani tentang keamanan dan penegakan hukum di laut yang berada langsung di bawah perintah Presiden. Kedua, pasal 30 memiliki implikasi bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antar wilayah, pemerintah harus melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional dalam laut, pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana laut, dan pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut. Ketiga, pasal 58 memiliki implikasi terbentuknya sistem pertahanan laut.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan strategi kerja sama bilateral di bidang maritim dengan beberapa negara kawasan guna mencapai tujuan nasionalnya. Perlunya menjalin kerja sama antar negara kepulauan dan negara pulau mendorong Kemenko Bidang Kemaritiman serta pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau secara global. Inisiatif itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk pertemuan tingkat pejabat tinggi di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 (Indonesia Inisiasi Kerja Sama Antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau, 2017).

Kerja sama bilateral yang dilakukan Indonesia, antara lain; pada tanggal 31 Mei 2017, pemerintah Indonesia dan Jerman mengusulkan agenda kerja sama di bidang kemaritiman. Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Deputy Perdana Menteri Jerman yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel menandatangani nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) itu di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin. Agenda kerja sama maritim yang diinisiasi Indonesia-Jerman itu meliputi kerja sama strategis maritim, keamanan dan keselamatan laut, investasi infrastruktur maritim, investasi galangan kapal, kerja sama riset dan teknologi serta pelatihan (Haryanto, 2017).

Yang kedua, kerja sama bilateral Indonesia-Australia dimana baik pemerintah Indonesia maupun Australia sepakat menandatangani perjanjian kerja sama di bidang maritim yang bertajuk *Plan of Action on Maritime Cooperation* selepas pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di Commonwealth Parliamentary Offices, 1 Bligh Street, Sydney, Australia pada tanggal 16 Maret 2018 lalu. Adapun perwakilan dari Indonesia merupakan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya dan *Deputy Secretary Indo-Pasific Group* Kementerian Luar Negeri Australia, Richard Maude. Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop turut hadir menjadi saksi atas penandatanganan *action plan*

perjanjian kerja sama tersebut. Dalam perjanjian itu, terdapat beberapa poin yang ditekankan dan perlu menjadi fokus agar perjanjian kerja sama ini terlaksana. Pertama, pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan *blue economy* yang bermula dari kesadaran Australia dan Indonesia akan pentingnya perdagangan maritim dan perkembangan kerja sama yang berkelanjutan. Kedua, memberantas kejahatan yang berlangsung di perairan Indo Pasifik dengan memperkuat pertahanan khususnya di bidang maritim. Ketiga, memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Keempat, meningkatkan keamanan maritim, mencegah serta merespons polusi yang terjadi di lingkungan maritim. Kelima, meningkatkan koordinasi dan manajemen risiko bencana maritim. Keenam, kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor maritim. Ketujuh, manajemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim. Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritim. Kesembilan, memperkaya kegiatan dialog baik skala regional maupun multilateral forum (Mardiastuti, 2018)

Ketiga, kerja sama di bidang maritim juga dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia guna mencapai kepentingan kedua negara, melindungi lautan, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Hingga pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Maritim (*Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation*). Lebih lanjut, bidang yang akan dikembangkan antara lain; pertama, melindungi masyarakat pesisir dan perikanan. Bantuan akan diberikan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendukung kelestarian keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola sumber daya kelautan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Tiga provinsi di kawasan Indonesia timur yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi menjadi fokus bantuan tersebut. Kedua, memerangi pencurian ikan. Demi memerangi dan mencegah pencurian ikan, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama dengan

membuat regulasi IUU Fishing (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN dalam panggung yang lebih luas. Amerika Serikat memberikan bantuan berupa pengembangan teknologi, integrasi sistem, serta pengembangan kapasitas termasuk pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Organisasi Pangan dan Pertanian, penegakan peraturan di bidang perikanan, serta mengenai analisis informasi dan intelijen yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Internasional AS, *National Oceanic and Atmospheric Administration*, Departemen Kehakiman, dan Departemen Pertahanan AS. Kerjasama ini juga akan mendukung kapasitas Indonesia untuk memenuhi persyaratan data baru dari program penelusuran asal makanan laut (*seafood traceability*) yang sedang dikembangkan untuk memerangi penipuan serta penangkapan ilegal produk makanan laut dalam perdagangan AS. Ketiga, Memperluas kerjasama IPTEK bidang kelautan. Dengan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara AS-Indonesia, *National Oceanic and Atmospheric Administration* bekerja sama dengan mitra-nya di Indonesia dalam lingkup observasi dan penelitian bersama terkait ekosistem laut, termasuk penelitian oseanografi serta keragaman perubahan iklim. Kerjasama ini akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut dan atmosfer serta kemampuan untuk memprediksi respons perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Ini sangat berguna bagi Amerika Serikat dan Indonesia karena akan membantu baik Amerika Serikat maupun Indonesia memperkirakan kekeringan dan curah hujan yang abnormal untuk wilayah di Indonesia, memahami bagaimana fenomena oseanografi di Samudra Hindia mempengaruhi Amerika Serikat, serta memahami dampak ekologis pengasaman air laut pada terumbu karang. Keempat, meningkatkan keamanan laut dan pelabuhan. Oleh karena itu Penjaga Keamanan Pantai AS (*U.S. Coast Guard*) dan Program *Export Control and Related Border Security Program* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan khusus untuk petugas penjaga

pantai. Peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional (*International Ship and Port Security*) juga dilakukan oleh *U.S. Coast Guard* melalui Program Keamanan Pelabuhan Internasional. Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi serta mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut, terutama untuk barang-barang yang dikirim antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kelima, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demi mengembangkan hubungan dagang kedua negara di sektor maritim, Amerika Serikat dan Indonesia akan menjajaki dan mendukung kegiatan perdagangan dan investasi. AS juga akan menjajaki kemitraan pemerintah-swasta, pertemuan delegasi bisnis, serta promosi melalui pameran dagang untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan pelabuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta, akan mendukung penggunaan metode penangkapan berkelanjutan oleh perusahaan makanan laut yang beroperasi di Indonesia. Keenam, membantu korban kerja paksa dalam industri makanan laut dan mendorong keadilan. Dana bantuan darurat akan diberikan Amerika Serikat untuk para korban guna membantu upaya Indonesia dan Organisasi Internasional Untuk Migrasi dalam menyelamatkan korban kerja paksa di sektor industri perikanan. Amerika Serikat juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi para korban dan merujuknya untuk perawatan, serta advokasi untuk menuntut serta mengadili para agen perekrutan, calo, dan pejabat publik korup yang terlibat dalam eksploitasi korban. Ketujuh, membantu dan melindungi pergerakan migrasi tidak teratur. Menanggapi krisis migran pada bulan Mei-Juni 2015 di Teluk Benggala dan Laut Andaman, Amerika Serikat memberikan dana darurat kepada Organisasi Internasional Untuk Migrasi dan Badan PBB untuk urusan pengungsi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) guna memenuhi kebutuhan para migran di Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, dan Bangladesh dengan menyediakan tempat

penampungan sementara dan barang-barang non-makanan, dukungan pelayanan kesehatan dan gizi, memberikan bantuan jika para imigran tersebut secara sukarela ingin kembali ke negaranya, serta memberikan perlindungan internasional (Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim, 2015).

C. PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI: FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL INDONESIA MEGGAGAS PERJANJIAN INDO-PASIFIK

Politik luar negeri Indonesia ditujukan dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional. Kemenangan Presiden Joko Widodo atau kerap disebut Jokowi dalam pemilihan umum pada tahun 2014 menandai perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia. Orientasi ke “luar” (*outward looking*) yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh orientasi ke “dalam” (*inward looking*) yang merupakan buah pemikiran Presiden Joko Widodo. Upaya Indonesia untuk mengambil peran global melalui aktivitas-aktivitas multilateral digantikan dengan upaya untuk membangun politik luar negeri yang dapat memberi keuntungan domestik serta memperkuat kedaulatan Indonesia (Alvian, Putri, & Ardhani, 2018)

Politik luar negeri “Bebas dan aktif” yang telah menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Indonesia sejak periode awal, merupakan doktrin bagi Jakarta dalam berinteraksi dengan negara-negara lain di tingkat regional dan global. Melalui ini, Indonesia dinyatakan bebas dari segala aliansi atau blok politik yang ada di panggung global. Pada saat yang sama itu juga menyiratkan kesediaan Jakarta untuk meningkatkan perannya dalam komunitas internasional.

Doktrin "Bebas dan Aktif" menunjukkan rasa hormat Indonesia terhadap kedaulatan atas negara-negara lain. Doktrin ini menuntut pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur dalam masalah politik dalam negeri negara bagian lainnya. Karena kedaulatan merupakan aspek yang sensitif dari setiap negara bagian, menyinggung aspek ini cenderung dapat

membawa negara menuju konflik. Indonesia memandang setiap negara memiliki otonomi nasional sendiri yang harus dihormati. Ini juga menjadi salah satu prinsip utama di ASEAN di mana Indonesia memainkan peran penting.

Dengan populasi besar serta sumber daya alam yang melimpah, ini menjadikan Indonesia memiliki alasan kuat untuk mengungguli dalam kancah regional maupun global. Kepemimpinan Indonesia telah diakui oleh dunia sejak kemerdekaannya. Meskipun sebagai bangsa baru, kepemimpinan menjadi karakteristik dominan Indonesia pasca kolonial. Berfokus dengan kebutuhan dalam negeri, hal tersebut menyebabkan kontradiksi antara aspirasi Indonesia sendiri untuk memperkuat kapasitas domestik dan kebijakan ekspansionisnya di ASEAN untuk menjaga keamanan kawasan. Dimulainya kerjasama regional memberi Indonesia peluang untuk mengambil peran kepemimpinan, karena stabilitas tidak dapat dicapai tanpa dukungan Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara.

Setiap era pemerintahan masing-masing Presiden di Indonesia memiliki perbedaan terhadap penerapan politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia dan pemahaman yang berbeda mengenai doktrin bebas-aktif. Di era Presiden Soekarno, misalnya, kebijakan luar negeri lebih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan, sedangkan selama Presiden Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi dengan mencari mitra di luar negeri. Diikuti oleh era reformasi dimana sistem diplomasi yang lebih demokratis juga meluas karena tuntutan pemegang kedaulatan rakyat sendiri. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana politik luar negeri Indonesia di tampilkan dengan sosok politik yang *high profile*. Keikutsertaan Indonesia dalam G-20 secara umum diakui tidak saja sebagai ekspresi pengakuan dunia terhadap perkembangan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. *Thousand friends zero enemy* (ribuan teman, nol musuh) merupakan sebuah semboyan atau jargon yang hadir mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono. Semboyan yang memiliki prinsip tanpa musuh dan banyak teman penting dalam rangka menekankan netralitas sikap Indonesia. Urgensi untuk menciptakan citra positif diperlukan guna mengklarifikasi kesalahpahaman dalam ranah internasional terhadap Indonesia yang semula kerap dianggap sebagai surga koruptor, pelanggar Hak Asasi Manusia, dan sarang teroris. Citra positif tersebut turut berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai pemegang amanah tuan rumah berbagai forum besar internasional seperti Konferensi Asia Afrika (KAA).

Darmansjah Djumala membuat perbandingan antara kebijakan luar negeri Jokowi dan praktik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perbandingan didasarkan pada empat indikator, yaitu masalah operasional, orientasi, pendekatan dan prioritas. Dalam hal orientasi, SBY memprioritaskan internasionalisme. Kebijakan luar negeri SBY moderat dan lebih fokus pada penanganan masalah politik dan demokrasi. Sementara itu, Jokowi menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Djumala menambahkan, kebijakan Jokowi lebih memprioritaskan masalah ekonomi kerakyatan daripada masalah politik.

Di bawah pemerintahan pertama Yudhoyono, ia menempatkan keterlibatan internasional sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Menambah teman dan mengurangi musuh, Yudhoyono telah mencoba untuk meningkatkan peran Jakarta di tingkat regional dan global. Ia mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia ke orientasi luar yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sejak ia terpilih sebagai Presiden. Yudhoyono memiliki pola politik luar negeri dimana ia mengedepankan citra Indonesia yang bersifat merangkul banyak pihak dalam kerja sama yang saling menguntungkan melalui diplomasi internasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan tempat bagi Indonesia di dunia internasional sehingga Indonesia dapat turut serta

menentukan dan berkontribusi untuk membuat tatanan global (Widiatmaja & Albab, 2019).

Yudhoyono juga menetapkan nasionalisme Indonesia sebagai nasionalisme yang terbuka, percaya diri, moderat, toleran, dan berwawasan luar. Di kesempatan lain, ketika Presiden Yudhoyono menekankan toleransi sebagai unsur penting kebebasan dan demokrasi dalam *Bali Democracy Forum* 2011, Yudhoyono menyatakan bahwa, "kami percaya bahwa kebebasan harus digabungkan dengan toleransi dan supremasi hukum, karena tanpa mereka kebebasan mengarah pada kebencian dan anarki yang tak terkendali" (Andika, 2016). Dalam pidato ketika dia berada di London pada tahun 2012 pun, Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia akan semakin aktif dalam menetapkan norma-norma yang berkaitan dengan tumpang tindih klaim teritorial yang akan memandu negara-negara regional dan akan menekankan pentingnya memiliki seperangkat norma dan aturan yang dapat mencegah kekerasan dan konflik yang disebabkan oleh kebencian dan intoleransi.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan dengan jelas bagaimana Yudhoyono mengarahkan pendekatannya pada kebijakan luar negeri berdasarkan cara non-kekerasan. Berbeda dengan periode pasca-Suharto awal, ketika pemerintah masih sibuk dengan pengembangan lembaga demokratis, Yudhoyono memulai masa jabatan Presiden pertamanya dengan membangun fondasi untuk peran aktif Jakarta di panggung internasional. Kebijakan luar negerinya mengacu pada apa yang disebut sebagai "ribuan teman-nol musuh". Kerangka ini menjadi arah kebijakan luar negeri Yudhoyono. Untuk memperkuat kerangka ini di tingkat regional, Marty Natalegawa mempromosikan istilah yang dikenal sebagai "keseimbangan dinamis". Melalui istilah ini Natalegawa menekankan bahwa situasi dinamis di wilayah ini adalah sesuatu yang dapat dikelola dengan menghubungkannya ke dalam tiga aspek; keamanan, kepentingan bersama, dan kemitraan.

Hingga ketika terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 mulai menyiratkan perubahan atau perbedaan dalam penerapan politik luar negeri Indonesia. Jokowi dan JK lebih menampilkan politik luar negeri yang *low profile* atau setidaknya mengurangi terlalu banyak tampil di luar negeri dan memilih fokus pada urusan dalam negeri atau ditunjukkan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat Indonesia dari dalam. Bagi pasangan ini, penguatan dan pembangunan ekonomi nasional nampak lebih menarik.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mencetuskan “diplomasi membumi” atau biasa disebut dengan sebutan “diplomasi pro-rakyat” dimana Indonesia akan lebih fokus pada isu-isu dalam negeri. Kebijakan ini akan lebih condong pada mengurus masalah-masalah domestik dibandingkan pemerintahan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menekankan pada penguatan peran Indonesia di kawasan dengan slogan “ribuan teman, nol musuh”. Pergeseran kearah domestik ini telah menyita perhatian dari banyak pengamat terkait dengan menurunnya keterlibatan Indonesia di panggung internasional. Jokowi dengan diplomasi pro-rakyatnya, membuat Indonesia berhasil memperoleh perhatian yang besar terkait cara Indonesia menyikapi isu-isu luar negeri.

David Singer membagi tingkat analisis kebijakan luar negeri guna memahami diplomasi pro-rakyat Jokowi terutama untuk memahami pembentukannya dalam dua tahap; panggung internasional dan domestik (Singer, 1961: 80). Tahap internasional yang berfokus pada perilaku aktor negara yang dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Tahap kedua adalah tahap domestik. Ini menekankan pada faktor domestik, yang memengaruhi urusan luar negeri negara. Ini mencakup latar belakang sejarah negara, tradisi keagamaan sosial, opini publik, dan dimensi geografis. Tingkat pendekatan analisis mencari faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar

negeri negara. Ini menjadi fondasi aktor negara dalam membangun model diplomasi.

Pemerintahan era Jokowi menggunakan pendekatan baru yang disebut "diplomasi pro-rakyat". Ini menempatkan kebutuhan domestik sebagai pusat kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi pro-rakyat Jokowi berakar pada prinsip-prinsip bebas dan aktif. Ini adalah campuran dari dua strategi tetapi dengan penekanan yang berbeda. Jika diplomasi Yudhoyono menekankan kehadiran Indonesia di panggung regional, maka fokus diplomasi pro-rakyat dalam mengoptimalkan semua kegiatan diplomasi harus mengarah pada manfaat ekonomi domestik. Dalam hal ini, faktor domestik menjadi penting di balik pembentukan kebijakan luar negeri Jokowi. Mengikuti arahan Jokowi tentang pendekatan kebijakan luar negeri pro-rakyat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerjemahkan pendekatan barunya pada pernyataan kebijakan tahunan pertamanya pada 8 Januari 2015. Menurutnya, Indonesia akan fokus pada tiga prioritas: mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.

Dalam kesempatan lain Retno juga menekankan tiga arah penting sebagai turunan dari kebijakan luar negeri pro-rakyat. Pertama, memperkuat ekonomi Indonesia melalui kegiatan diplomasi. Untuk mencapainya, harus ada hubungan timbal balik antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pembangunan ekonomi. Kedua, aktif dalam melakukan mekanisme bilateral sebagai instrumen diplomatik daripada forum multilateral. Ketiga, memungkinkan pakar hubungan internasional untuk lebih aktif dalam mempromosikan keunggulan kompetitif Indonesia secara ekonomi. Para diplomat sangat diharapkan untuk memainkan hal-hal yang diperlukan untuk mengintegrasikan Indonesia dengan pasar dunia.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa Jokowi mengabaikan kehadiran Indonesia di panggung internasional. Mempertahankan keberadaan Indonesia di panggung internasional masih diperlukan untuk mendukung manfaat ekonomi nasional-domestik. Diplomasi pro-rakyat juga tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan kedekatan geografis. Lingkaran pertama ditempatkan oleh ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Negara-negara di Asia Timur mengikuti tahap kedua dan tahap ketiga adalah negara-negara tetangga di kawasan Indo Pasifik. Di bawah kerangka kerja ini fokus diplomasi pro-rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik, diplomasi pro-rakyat harus melibatkan pemain strategis di setiap tahap di bawah arsitektur regional yang inklusif.

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan diatas maupun di bab sebelumnya, terdapat setidaknya ada empat faktor terkait dengan alasan Indonesia menggagas perjanjian Indo-Pasifik, yaitu: Pertama, memperkuat ekonomi Indonesia melalui kegiatan diplomasi. Kegiatan diplomasi ini dapat berupa kerja sama antar-negara kawasan khususnya di bidang ekonomi maritim sebagai syarat untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur. Kedua, mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemanfaatan secara maksimal serta pengelolaan kekayaan yang tepat pada sumber daya yang tersebar luas di lautan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Ketiga, menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik selaku penggagas perjanjian Indo-Pasifik dan sebagai *big brother* bagi ASEAN. Sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri ke dalam yang digagas oleh Presiden Jokowi, keamanan kawasan dapat diwujudkan dengan menunjukkan sikap saling percaya serta menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal yang menjarah kekayaan sumber daya laut di kawasan. Keempat, meredam konflik yang berpotensi akan mengancam keamanan kawasan dengan cara menjalin kerja sama karena kerja sama merupakan salah satu cara untuk menghasilkan hubungan yang baik antar-

negara sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik.

Tindakan nyata dari Jokowi dalam menerapkan kebijakan luar negeri pro-rakyat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan domestik memang telah menarik perhatian dan dukungan publik. Misalnya, bisa dilihat dari kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kementerian Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa kebutuhan domestik menjadi prioritas dan juga melindungi kedaulatan Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi telah berulang kali menyatakan bahwa sekitar 5.000 kapal yang sebagian besar berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Cina, menyeberang dan beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia setiap hari. Data terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 Indonesia telah menenggelamkan sekitar 488 kapal dan kebanyakan dari mereka berasal dari Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia (Wijaya & Marta, 2019)